



# LEMHANNAS RI

## NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

EDISI XI 20 JUNI 2010



Prof. Dr. Muladi, S.H. memberikan sambutan pada upacara 17 Juni 2010

## Upacara Bendera 17 Juni 2010

efisien, efektif, dan produktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Lemhannas RI untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 berhasil mendapat peringkat "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Ini merupakan suatu prestasi yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan terutama dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Untuk itu, diperlukan sikap dasar atau komitmen yang disinergikan dengan cita-cita dan tujuan lembaga.

Gubernur menginformasikan bahwa Wakil Presiden RI pada tanggal 16 Juni 2010 telah memberikan pengarahan tentang peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang pada dasarnya menekankan pentingnya peningkatan kinerja secara terukur (*outcome-oriented*), terhindar dari penyalahgunaan kewenangan publik, dan suksesnya suatu bangsa tergantung dari perjuangan bangsa itu sendiri.

Gubernur juga menyampaikan bahwa peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV akan melaksanakan kegiatan utama yaitu Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), dan peserta dibagi ke 4 negara tujuan, yakni Inggris, Bulgaria, Polandia dan Korea Selatan.

Sebelum mulai melaksanakan program pendidikan *on campus* pada tanggal 14 Juni 2010, peserta PPRA XLV melakukan

kegiatan *outward bound* selama 2 (dua) hari di Sukabumi. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk melatih fisik para peserta juga melatih kekompakan, kerjasama dan koordinasi dalam suatu tim atau kelompok yang merupakan modal dasar dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa.

Selain itu disampaikan telah dilakukan revitalisasi pusat kebugaran (**Fitness Centre**) Lemhannas, dengan perubahan, pembaharuan peralatan dan pengelolaan serta fasilitas yang disediakan untuk organik Lemhannas dan peserta PPRA/PPSA.



Saat Pengibaran bendera merah putih

Pada tanggal 22-23 Juni 2010, bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa, Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) akan menyelenggarakan seminar nasional sistem keamanan nasional (siskamnas) dengan tema "**Mencari Format Sistem Keamanan Nasional dalam Era Demokrasi dan Globalisasi**", yang akan dibuka oleh Presiden RI, DR. Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk itu, Gubernur menghimbau seluruh personil Lemhannas agar mempersiapkan diri secara fisik, mental dan intelektual guna mendukung pelaksanaan acara tersebut.

Gubernur juga menginformasikan bahwa pada saat ini Lemhannas RI sedang melaksanakan tahapan pembangunan tambahan *mess* untuk para peserta pendidikan Lemhannas, sebanyak 4 lantai untuk 140 kamar, dan 1 lantai untuk auditorium dengan sistem theateristik.

### DAFTAR ISI

1. Upacara Bendera 17 Juni 2010.....	1
2. Kebangkitan Era Keterbukaan .....	2
3. Hakikat Kepemimpinan Strategis.....	3
4. Optimalisasi Pemanfaatan Sektor Migas.....	4
5. Percepatan Pengembangan Kekuatan TNI di Daerah Perbatasan Antar Negara.....	5
6. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Lemhannas RI.....	6
7. Rangkaian Kegiatan dalam rangka HUT ke-45 Lemhannas RI.....	7
8. Kunjungan The National War College.....	8
9. Kunjungan The United States Marine Corps War College.....	9
10. Kunjungan Pakistan Air War College.....	10
11. Pelatihan Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik.....	11
12. Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI.....	12

# KEBANGKITAN ERA KETERBUKAAN



Gubernur Lemhannas RI sebagai pembicara utama didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Peneliti Senior dari Habibi Center dalam acara Bincang malam TVRI tanggal 19 Mei 2010

**G**ubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memberikan pandangannya tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam diskusi bertema “**Kebangkitan Era Keterbukaan dalam Kerangka National Character Building**” dalam bincang malam yang disiarkan oleh TVRI tanggal 19 Mei 2010. Hadir juga dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, dan Peneliti Senior dari Habibi Center, Dr. R. Siti Zuhro, M.A. sebagai pendamping narasumber.

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengisyaratkan institusi negara termasuk badan-badan didalamnya harus memberikan informasi publik yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat.

Bagi Gubernur, Indonesia bisa berharap banyak pada UU No.14 Tahun 2008. Undang-undang tersebut merupakan produk reformasi, demokratisasi, dan menyangkut prinsip *good governance*. Namun demikian, masyarakat masih belum siap dan belum mengerti tentang undang-undang tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Selama 2 (dua) tahun, undang-undang tersebut ditunda dikeluarkan, untuk itu Gubernur Lemhannas mengatakan kita memerlukan langkah cepat dan sistematis untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut sampai di daerah.

UU No.14 Tahun 2008 memiliki nilai filosofis memperkuat publik bukan pemerintah. Hal ini merupakan esensi dari reformasi dengan dua ujung tombaknya demokratisasi dan keterbukaan, sehingga diharapkan publiklah yang proaktif untuk meminta informasi yang seluas-luasnya kepada pemerintah dan negara. Lewat UU ini diharapkan tercipta prinsip *good governance* yaitu pemerintahan yang memiliki 3 (tiga) pilar yaitu negara, sektor privat, dan masyarakat sipil (**state, private sectore, dan civil society**). Untuk itu, tidak hanya negara, tetapi lembaga publik, lembaga yudikatif, legislatif, BUMN, partai politik, LSM, dan lembaga-lembaga

yang dibiayai oleh APBN dan APBD, harus mampu memberikan keterbukaan pelayanan informasi. UU No.14 Tahun 2008 ini merupakan suatu bagian dari *index competitiveness*, indeks daya saing Indonesia untuk menambah kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia yang mampu mendorong pemimpin tiap instansi untuk mampu menggerakkan dan memberi contoh kepada bawahannya karena sangat penting dalam kehidupan demokrasi di masa depan. UU KIP memberi pengaruh besar untuk Lemhannas, terutama bila melihat fungsinya sebagai leadership training centre dan juga think-tank kepada presiden yang memberikan masukan-masukan strategis. Untuk menyikapi hal ini, Lemhannas harus membangun organisasi dan tata kelola yang baik, *planning program, budgeting system*, serta sumber daya manusia yang baik.

Gubernur Lemhannas RI mengatakan, UU KIP masih memiliki kelemahan, yaitu dari segi struktur, substansi, dan budaya. Dari segi struktur, komisi informasi masih belum sempurna, dan masih harus diaktifkan hingga ke daerah. Dari segi substansi, UU KIP memerlukan peraturan mekanisme dan pengaturan daftar pengecualian. Dari segi budaya, negara, sektor privat, dan masyarakat harus mempunyai pandangan, sikap, persepsi, filosofi yang sama mengenai undang-undang tersebut.

# HAKIKAT KEPEMIMPINAN STRATEGIS

**A** cara ceramah pada tanggal 21 Mei 2010 di Bandung, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. menyampaikan materi tentang Hakikat Kepemimpinan Strategis kepada peserta Sekolah Staf dan Komando TNI.

Dijelaskan bahwa, suatu kepemimpinan yang transformasional akan mampu meningkatkan kesadaran mengenai apa yang benar, baik, penting, dan indah, serta mampu meningkatkan kebutuhan pengikutnya akan pencapaian dan aktualisasi diri. Selain itu kepemimpinan yang transformasional juga dapat menyokong kedewasaan moral yang tinggi dari para pengikutnya dan menggerakkan mereka untuk tidak menomorsatukan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok, organisasi atau masyarakatnya.

Dalam ceramahnya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan beberapa pendapat mengenai kepemimpinan. **Pertama**, menurut Bennis (1998), ada beberapa perbedaan antara seorang manajer, pemimpin dan negarawan. Seorang manajer akan bertindak sebagai administrator, bersifat meniru, mempertahankan dan terfokus pada sistem dan struktur, bergantung pada kontrol, memiliki pandangan jangka pendek dan dalam hal pertanyaan terfokus pada bagaimana dan kapan, menerima *status quo*, dan melakukan hal dengan benar.

Seorang pemimpin melakukan inovasi, bersifat original, mengembangkan, fokus pada orang, menginspirasi kepercayaan, memiliki pandangan jangka panjang, selalu bertanya tentang apa dan mengapa, menantang *status quo*, memiliki orang-orang, dan melakukan hal-hal dengan benar.

Seorang negarawan adalah seorang yang hebat dengan karakter luar biasa menyangkut individu, sosial, kelembagaan, moralitas global dan pertanggungjawaban. Negarawan adalah seseorang yang melakukan kepemimpinan politik dengan bijak tanpa keberpihakan yang sempit.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi S.H. memberikan ceramah di Sekolah Staff dan Komando TNI di Bandung.

**Kedua**, menurut Parson (1951), mengenai kepemimpinan dan ketahanan nasional, mengatakan bahwa kebijakan dan regulasi kepemimpinan harus merupakan sarana pengintegrasikan dari fungsi-fungsi adaptasi ekonomi, *goal attainment* politik dan fungsi *latency* (*pattern of maintenance*) budaya.

**Ketiga**, Shergold (2009) mengatakan bahwa kepemimpinan memiliki komponen-komponen sebagai berikut: **pertama**, *collegiality* atau kolegalitas (kemampuan membangun kerja tim); **kedua**, *execution* atau eksekusi (komitmen untuk melaksanakan keputusan yang sudah diambil); **ketiga**, *persistence* atau ketekunan (ketahanan untuk mengatasi segala kendala); **keempat**, *authenticity* atau keaslian (jaringan pemerintah dan pembuatan keputusan berdasarkan bukti atau fakta); **kelima**, *pride in vocation* atau kebanggaan akan pekerjaan (terkait dengan prinsip umum dari administrasi yang baik).

**Keempat**, menurut Cohen (2004), ada 11 (sebelas) generalisasi karakter kepemimpinan strategis, yaitu: **pertama**, keterikatan pada tujuan yang pasti; **kedua**, kemampuan merumuskan inisiatif dan secara konsisten menjaganya; **ketiga**, pertimbangan ekonomis dalam mendayagunakan segala sumber; **keempat**, kemampuan untuk mendayagunakan secara maksimal dan positif posisi strategis; **kelima**, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga; **keenam**, selalu berorientasi pada kemudahan dan kesederhanaan; **ketujuh**, kemampuan untuk menyiapkan pelbagai alternatif secara simultan; **kedelapan**, kemampuan untuk melakukan langkah-langkah yang tidak langsung untuk mencapai tujuan; **kesembilan**, selalu mempertimbangkan saat yang tepat disertai dengan urutan program yang pasti; **kesepuluh**, kemampuan untuk selalu memanfaatkan setiap keberhasilan; **kesembelas**, cepat mengakui ide-ide yang baik dan berusaha menegakkan kejujuran intelektual.



Para peserta SESKO TNI sedang mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI

# OPTIMALISASI PEMANFAATAN SEKTOR MIGAS

Pada tanggal 24 Mei 2010, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI DR. Rio Mendung Thalieb memimpin acara *Round Table Discussion* (RTD) di Ruang Rapat Lt. III Barat Gd. Asta Gatra. Tema yang dibahas dalam RTD tersebut adalah mengenai "**Optimalisasi Pemanfaatan Sektor Migas melalui Revitalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional**".

Ketahanan energi sektor migas merupakan faktor penggerak roda perekonomian yang penggunaannya masih sangat dominan di dalam negeri sehingga hal ini memaksa pemerintah untuk senantiasa memenuhi kebutuhan BBM dengan harga yang terjangkau masyarakat.

Fluktuasi harga minyak internasional pernah mengalami pelonjakan harga sangat tinggi sehingga pemerintah terpaksa melaksanakan kebijakan subsidi yang sangat memberatkan neraca anggaran biaya negara. Kebijakan menaikkan harga migas dalam negeri terpaksa diambil sehingga menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing nasional. Dampaknya secara luas adalah kenaikan harga barang yang membebani kehidupan masyarakat.

Sektor migas pernah menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, yaitu sebesar 28% dari total pendapatan negara pada tahun 2005. Namun hal ini tidak diikuti dengan reinvestasi yang terlihat dari kecilnya anggaran yang diberikan dari sektor migas kepada kementerian ESDM di setiap tahunnya, yang nilainya hanya sekitar 3% dari jumlah penerimaan negara yang berasal dari sektor migas, sehingga mengakibatkan kurang berkembangnya sektor migas dalam negeri, dan berujung menjadi negara pengimpor migas.

Walaupun penyesuaian harga BBM dalam negeri yang dilakukan tahun 2005 telah menghemat anggaran negara sebesar USD 59 miliar, namun pemerintah masih mengeluarkan sebanyak USD 9 miliar untuk berbagai subsidi terutama untuk subsidi minyak dan listrik.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang energi melalui peraturan presiden RI nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri serta mendukung ketahanan energi nasional, dalam rangka mendukung pembangunan. Peraturan presiden ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam melaksanakan konversi dan diversifikasi sumber energi



*Suasana Round Table Discussion yang bertempat di Ruang Rapat Lt. III Barat Gedung Asta Gatra*

guna meningkatkan pembangunan ekonomi.

Angka konsumsi migas Indonesia melebihi angka produksi sebesar 24.000 barel/hari, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah memasuki tahap sebagai *net importer*. Sedangkan dari sisi produksi terdapat kecenderungan menurun dan penurunan yang cukup tajam terjadi sejak tahun 2000. Angka rata-rata penurunan minyak produksi minyak setiap tahunnya bisa mencapai 66.000 barel/hari. Dan jika kita merujuk pada angka konsumsi minyak pada tahun 2004 yakni sebesar 1.150.000 barel/hari, maka cadangan minyak Indonesia diperkirakan akan habis dalam waktu sekitar 11 tahun.

Kebijakan Indonesia keluar dari OPEC berawal dari semakin menurunnya kemampuan ekspor minyak Indonesia sejak tahun 1998. Kebutuhan aktual saat ini yang mencapai 1,2 juta barel/hari tidak seimbang dengan produksi minyak yang hanya mencapai 0,942 juta barel/hari.

Konservasi energi akan mendatangkan manfaat bukan hanya untuk masyarakat yang konsumsi energi per kapitanya telah sangat tinggi, namun juga oleh negara yang konsumsi energi per kapitanya rendah, seperti Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat konservasi energi tidak berkembang di Indonesia, adalah adanya pandangan di kalangan masyarakat bahwa Indonesia sebagai negara yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya energi yang berlimpah, dan karena itu menggunakan energi secara hemat tidak dianggap sebagai suatu keharusan.

# PERCEPATAN PENGEMBANGAN KEKUATAN TNI DI DAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARA

Pada tanggal 25 Mei 2010 di ruang rapat Nusantara I Gedung Tri Gatra dilaksanakan acara *Round Table Discussion* (RTD) dengan tema "**Percepatan Pengembangan Kekuatan TNI di Daerah Perbatasan Antar Negara untuk Menunjang Penggelaran Sistem Pertahanan Negara dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI**". Acara RTD dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI DR. Rio Mendung Thalieb.

Dalam keynote speechnya antara lain disampaikan bahwa wilayah merupakan salah satu unsur negara yang merdeka dan berdaulat, oleh sebab itu setiap bangsa dan negara di dunia ini senantiasa menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatannya dari berbagai ancaman dengan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa dan negara melalui implementasi sistem pertahanan negara.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dan terletak pada posisi silang, sehingga memiliki arti dan peranan yang sangat penting dan strategis terkait kepentingan ekonomi serta pertahanan dan keamanan global maupun regional. Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi ini, yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (informasi, komunikasi dan transportasi) maka interaksi ke seluruh penjuru dunia khususnya di daerah perbatasan yang mempunyai perbedaan baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun sistem pertahanan dan keamanan negara akan semakin intensif.

Secara umum permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan antar negara saat ini adalah: **pertama**, belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh; **kedua**, terjadinya kesenjangan pembangunan yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat perbatasan dengan negara tetangga maupun dengan wilayah lain sekitarnya; **ketiga**, rendahnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang disebabkan oleh orientasi pembangunan yang *inward looking* serta lebih menekankan kepada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat semata; **keempat**, isu pelintas batas tradisional ilegal yang disebabkan oleh kesamaan budaya, adat, dan keturunan serta persoalan tanah ulayat masyarakat yang ada di dua wilayah negara; **kelima**, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, sementara

potensi yang ada sangat besar sehingga mengundang kelompok *non state actor* untuk melakukan kegiatan ilegal; **keenam**, belum optimalnya kerjasama internasional untuk menangani persoalan wilayah perbatasan antara RI dengan negara tetangga; **ketujuh**, kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal; **kedelapan**, belum tertatanya gelar satuan TNI secara proporsional di perbatasan yang dapat membangun rasa aman dan tenteram bagi masyarakat setempat.

Permasalahan di wilayah perbatasan antar negara sangat kompleks, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun pada bidang yang sangat krusial yakni masalah batas negara. Oleh karenanya pembangunan daerah perbatasan antar negara harus dilakukan secara simultan antara pendekatan keamanan dalam arti luas (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Program pembangunan perbatasan perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dari semua kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Salah satu program pembangunan perbatasan yang memiliki prioritas tinggi adalah aspek pertahanan negara. Pembangunan kekuatan TNI khususnya di daerah perbatasan antar negara selain mencegah, mengatasi dan mempertahankan kedaulatan/keutuhan wilayah NKRI, juga berperan sebagai alat *deterrence, bargaining, diplomasi, perdamaian dan edukasi*, meskipun pada akhirnya dipersiapkan sebagai alat untuk perang.



*Round Table Discussion yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI DR. Rio Mendung Thalieb di Ruang Nusantara I Gd. Tri Gatra Lemhannas RI*

# UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-45 LEMHANNAS RI

S elama kurun 45 tahun pengabdianya, Lemhannas RI dari waktu ke waktu telah menunjukkan prestasi terbaiknya dalam mengemban setiap tugas, sehingga selama rentang waktu tersebut telah terukir suatu untaian keberhasilan yang sangat membanggakan, yang merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan kerjasama tiap warga Lemhannas RI. Dengan tema "**Dengan Reformasi Birokrasi, Menjadikan Lemhannas RI Sebagai Salah Satu Penggerak Proses Demokratisasi yang Berbudaya**", Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memberikan sambutannya pada upacara peringatan HUT ke-45 Lemhannas RI pada 20 Mei 2010.

Lemhannas RI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada langsung di bawah Presiden RI, dengan tugas pokoknya meliputi: **pertama**, menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif, mempunyai cakrawala pandang universal dan menjunjung tinggi nilai-nilai wawasan kebangsaan; **kedua**, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh presiden, dalam menjamin wibawa dan keutuhan serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; **ketiga**, menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan terkandung di dalam 4 (empat) prinsip dasar, yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Sesanti Bhinneka Tunggal Ika; **keempat**, menyelenggarakan pengembangan ketahanan nasional meliputi, astagatra, konsepsi nasional dan nilai-nilai universal melalui berbagai pendekatan termasuk pendayagunaan teknologi; **kelima**, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai institusi yang relevan di dalam dan luar negeri meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan harmoni nilai-nilai universal.

Dalam pidatonya, Gubernur merangkum beberapa kebijakan yang telah diberlakukan, yaitu kebijakan di bidang pendidikan, diarahkan untuk mendidik dan melatih para kader pemimpin bangsa; kebijakan pengembangan bidang pengkajian yang tidak hanya menghasilkan **policy recommendation** dengan karakteristik analisisnya ditinjau dari gatra alamiah dan gatra sosial serta dirumuskan melalui keterpaduan antara atmosfer akademik dan substansi tinjauan masing-masing gatra; serta kebijakan di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi nilai-nilai ideologi Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Selaras dengan dinamika perkembangan global, regional, dan nasional, Lemhannas RI melakukan perubahan melalui revitalisasi dan restrukturisasi yang dirancang secara sistemik dengan berpedoman pada sebelas prinsip pembaharuan yang meliputi prinsip profesionalisme, prinsip *checks and balances*,

prinsip *continuing education*, prinsip kebenaran, prinsip *quality assurance*, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip transparansi, prinsip reformasi, prinsip sistemik, prinsip keseimbangan, dan prinsip adaptasi teknologi.

Gubernur juga memaparkan capaian dan karya nyata yang terus dikembangkan oleh Lemhannas RI saat ini antara lain: Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia; pembentukan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional atau Labkurtannas; Perumusan secara berlanjut dokumen Pedoman Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; Penerimaan peserta asing mulai tahun anggaran 2009; melaksanakan Forum Konsolidasi secara bertahap pada T.A. 2009 dan 2010; mengimplementasikan sarana *Information and Communication Technology* (ICT), yakni *e-Learning*, *e-Office*, *e-Procurement*, *e-Library*, *e-Evaluation*, *e-Capacity Building*, dan *e-Labkurtannas*; serta reformasi birokrasi Lemhannas yang pada dasarnya telah dilaksanakan sejak 7 Februari 2006.

Lemhannas telah mengalami perubahan yang mendasar dan monumental, dalam implementasinya Lemhannas telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit dari BPK RI pada tahun 2007, 2008, dan 2009 secara berturut-turut dan penghargaan dari pemerintah atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan laporan keuangan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi pada 15 Maret 2010 menilai akuntabilitas kinerja Lemhannas rangkingnya naik yang semula pada 2009 menempati peringkat 70 menjadi peringkat 15 dari 74 institusi yang dinilai.

Atas prestasi dan capaian kinerja tersebut, Lemhannas RI terus melakukan pembaharuan dan perubahan melalui revitalisasi dan restrukturisasi yang dirancang secara sistemik dan untuk mempertajam proses reformasi birokrasi.



Upacara peringatan HUT ke-45 Lemhannas RI pada tanggal 20 Mei 2010

# RANGKAIAN KEGIATAN DALAM RANGKA HUT KE-45 LEMHANNAS RI



Upacara kehormatan saat Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur



Para Deputi yang turut hadir dalam Acara syukuran HUT Lemhannas RI



Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata tanggal 17 Mei 2010



Doa bersama saat Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur



Upacara Kehormatan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta



Prof. DR. Emil Salim melakukan paparan dalam acara Orasi Ilmiah



Pemotongan Nasi Tumpeng dalam Acara Syukuran HUT Lemhannas



Panglima TNI, KASAL dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Hadir saat Orasi Ilmiah HUT ke-45 Lemhannas RI



Sambutan Gubernur, Prof. DR. Muladi S.H. pada Upacara HUT Ke-45 Lemhannas RI



Reog Ponorogo ikut serta memeriahkan HUT sebagai Acara Hiburan



Peresmian Digital Presensi Sidik Jari oleh Gubernur Lemhannas RI

## KUNJUNGAN

# DELEGASI THE US NATIONAL WAR COLLEGE

Pada tanggal 12 Mei 2010, Lemhannas RI menerima kunjungan dari *The National War College* (NWC) Amerika Serikat. Rombongan NWC yang dipimpin oleh Mr. Eric Erskine Austin tersebut bermaksud untuk mengadakan diskusi dan *sharing knowledge* dengan Lemhannas RI. Sebelumnya pimpinan rombongan beserta dua staffnya melakukan *courtesy call* kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, yang didampingi Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Karo Humas dan Karo Kerma Lemhannas RI.



Suasana *Courtesy call* kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI DR. Rio Mendung Thalieb oleh pimpinan rombongan Mr. Eric Erskine Austine didampingi dua staffnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Taprof Bidang Diplomasi Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, dihadiri oleh 11 (sebelas) peserta NWC, Taprof Bidang Diplomasi Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo dan Taprof Bidang Ekonomi Ir. Timotius D. Harsono, dan 6 (enam) orang perwakilan peserta PPRA XLIV Lemhannas RI.

Topik dalam diskusi tersebut antara lain terkait dengan masalah ekonomi, politik, militer, dan demokrasi di Indonesia. Diskusi berjalan sangat hangat, dan para pesertanya cukup antusias dalam memahami permasalahan masing-masing dan bertukar pikiran tentang demokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat sendiri.

*The National War College* adalah lembaga pendidikan nasional yang didirikan sejak tahun 1946 dan memfokuskan diri pada masalah pertahanan nasional, strategi, dan pendidikan calon pemimpin masa depan. Isu studi yang diangkat di NWC antara lain adalah masalah terorisme, *disaster response*, kemanusiaan, *global warming*, dan penyakit. Pelajaran di NWC terutama dikaitkan dengan isu regional, internasional, dan tantangan ke depan yang dihadapi AS. Komposisi peserta studi di NWC terdiri dari 75% militer dan 25% sipil yang bekerja untuk pemerintah AS. Guna meningkatkan kualitas pendidikan calon pemimpin dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam demokrasi, maka NWC merasa perlu melakukan diskusi dengan lembaga-lembaga

penting di dunia termasuk Lemhannas RI.

Dalam diskusi tersebut mengemuka antara lain pertanyaan tentang proses seleksi peserta untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Latar belakang peserta pendidikan yang beragam menjadikan Lemhannas RI sebagai tempat yang tepat untuk mendiskusikan berbagai permasalahan bangsa dengan perspektif berbeda namun tetap satu tujuan, yaitu memajukan bangsa. Lemhannas RI telah bekerja sama dengan berbagai universitas negeri dalam menyelenggarakan pendidikan seperti dengan UGM, UI, dan Unpad. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat membagi ilmu pengetahuan dan keragaman perspektif kebangsaan tentang ketahanan nasional.

Amerika Serikat dan Indonesia dapat bekerja sama dalam mengurangi ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan AS terutama terkait dengan isu Islam dan terorisme. AS perlu merubah *image* negatif yang berkembang tentang Indonesia, media, dan dunia. Kekakuan-kekakuan hubungan yang terjadi antara AS dan Indonesia selama ini mengesankan bahwa hanya Indonesia yang membutuhkan AS, padahal kenyataannya Indonesia dan AS saling membutuhkan. Isu-isu yang perlu ditinjau lebih lanjut contohnya dukungan AS yang membabi-butakan terhadap Israel, isu terorisme, kontroversi keberadaan laboratorium penelitian Namru milik angkatan laut AS di Indonesia, dan diskriminasi yang dilakukan oleh *Homeland Security* AS dalam memperlakukan mereka yang dianggap teroris. Dari diskusi terlihat banyak hal yang bisa didapat jika hubungan antara Indonesia dan AS membaik. Indonesia berharap banyak dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS yang telah berusaha memulai menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia maupun dengan dunia Islam, yang terlihat dari kebijakan rencana penarikan pasukan AS dari Irak, hingga inisiatif berdialog dengan dunia Islam.

Acara tersebut ditutup dengan sesi foto bersama di gedung Tri Gatra.



Foto bersama antara peserta National War College dengan Tim Diskusi Lemhannas RI di Ruang Nusantara



# KUNJUNGAN THE UNITED STATES MARINE CORPS WAR COLLEGE



*Courtesy call tamu dari United States Marine Corps War College (USMCWC) kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI di Ruang kerjanya*

Rombongan peserta *United States Marine Corps War College* (USMCWC) mengunjungi Lemhannas RI pada 25 Mei 2010 untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah pertahanan, keamanan, dan perspektif Indonesia tentang China dan Amerika Serikat, serta isu keamanan internal Indonesia. Ketua Rombongan melakukan *courtesy call* kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsda TNI DR. Rio Mendung Thalieb. Selanjutnya tamu USMCWC berdiskusi dengan Taprof Lemhannas RI yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo, Ir. Timotius D. Harsono, serta dari Peserta PPRA XLIV, sebagai moderator diskusi adalah Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP. dan Ketua Rombongan USMCWC adalah Mr. Barry J. Levin, Ketua Departemen USMCWC.

Dalam diskusi tersebut pembicaraan begitu antusiasnya, antara lain tentang permasalahan ekonomi dan bagaimana Indonesia menempatkan China sebagai model pembangunan serta hubungan China dengan Indonesia selain itu berkembang pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar negara yaitu Indonesia dengan India, Indonesia dengan Amerika Serikat; serta pertahanan, keamanan, dan subsidi bahan bakar minyak, listrik, dan pendidikan.

Kaitannya dengan ekonomi, Indonesia menempatkan China dalam dua posisi, yaitu: **pertama**, sebagai pangsa pasar yang luas; **kedua**, sebagai saingan bisnis. Dalam perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) misalnya, dari segi ekonomi, Indonesia dan China saling membutuhkan satu sama lain, dan akibat perjanjian tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis Indonesia bersaing ketat dengan China. Penduduk China yang besar tentunya merupakan potensi pasar yang besar bagi Indonesia, ditambah *food security* Indonesia yang lebih stabil dan lahan pertanian yang jauh lebih luas dibanding China yang hanya memiliki lahan pertanian sebesar 7%. Namun, ACFTA perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah terutama untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan ekonomi, karena tantangan ekonomi terbesar yang dihadapi Indonesia adalah berasal dari tantangan non-ekonomi itu sendiri, yaitu permasalahan rendahnya pendidikan sumber daya manusia di Indonesia dan rendahnya kesejahteraan, sedangkan dengan India, Indonesia bersaing sehat karena India mengembangkan produk industri yang berbeda yaitu di sektor industri otomotif dan IT. Direncanakan sekitar Juli 2010, Indonesia akan mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan India. Perjanjian perdagangan tersebut akan menyebabkan kehilangan investasi sebesar USD 15 miliar di sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Sementara itu terkait dengan isu pertahanan dan keamanan, tentang langkah strategis yang bisa ditempuh untuk membangun Indonesia. Cara pertama yang dibutuhkan dalam membangun Indonesia adalah dengan membangun demokrasi. Demokrasi membawa kepada kebebasan memberikan pendapat, namun tidak menjamin stabilnya politik. Cara yang kedua adalah dengan meningkatkan pendidikan bangsa, yaitu dengan memberikan beasiswa, kemudahan mengakses pendidikan, dan pendidikan yang murah, karena pendidikan rakyat Indonesia masih sangat rendah, hanya 18% dari total penduduk yang dapat melanjutkan keperguruan tinggi.

Dari segi ketahanan dan pertahanan bangsa, Indonesia perlu membangun hubungan antar negara secara strategis (*strategic partnership*), agar tercapai tujuan bangsa Indonesia dalam memajukan bangsa. Hubungan baik antara Indonesia dengan AS, China, India, ataupun tergabungnya Indonesia dalam *East Asia Community* (EAC) perlu ditingkatkan. Keberadaan EAC adalah bagian dari kebutuhan Indonesia akan forum yang lebih besar dari ASEAN untuk mendukung kemajuan bangsa, dan mengimbangi kekuatan G20 dan konfigurasi AS di dunia.



*Tamu USMCWC berdiskusi dengan Taprof Lemhannas RI yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo, Ir. Timotius D. Harsono, serta perwakilan Peserta PPRA XLIV*

# KUNJUNGAN PAKISTAN AIR WAR COLLEGE

Pada tanggal 26 Mei pukul 10.00–13.00 WIB Lemhannas RI menerima kunjungan delegasi Pakistan *Air War College* yang terdiri dari 15 (lima belas) anggota delegasi. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka *study tour* perbandingan luar negeri di Indonesia. Sebelum acara diskusi, pimpinan Pakistan *Air War College*, Marsekal Muda Tubrez Asif SI (M), beserta dua orang staf, melakukan *courtesy call* kepada Gubernur Lemhannas RI dengan didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sektama, Tajar Bidang Hubungan Internasional, Karo Humas dan Karo Kerma Settama Lemhannas RI. Pada acara diskusi di Gedung Asta Gatra Lt. III Barat, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S. IP bertindak selaku pimpinan diskusi dengan didampingi oleh tenaga profesional bidang diplomasi Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo dan Tenaga Profesional bidang ekonomi, Ir. Timotius D. Harsono, M. Si serta 6 (enam) orang perwakilan peserta PPRA XLIV.

Dalam acara diskusi yang berjalan cukup hangat tersebut, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S. IP menegaskan bahwa Lemhannas RI adalah lembaga *think-tank* resmi pemerintah Indonesia. Selain itu dijelaskan juga bahwa Indonesia berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk itu kapasitas dan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Meski hal ini butuh waktu yang cukup panjang, Indonesia dinilai masih berada dalam jalur yang benar untuk menuju ke arah sana (*on the right track*).

Kebijakan pembangunan pemerintah yang menjadi prioritas utama saat ini adalah prinsip *triple track strategy*: *pro-growth* (pro pertumbuhan), *pro-poor* (pro kemiskinan) dan *pro-job* (pro penciptaan lapangan kerja). Untuk itu, selain fokus pada *health care* dan sektor riil, 20% dari



Gubernur Lemhannas RI menerima pimpinan rombongan delegasi Pakistan *Air War College* di Ruang kerjanya

anggaran negara dialokasikan untuk bidang pendidikan. Semua ini menunjukkan suatu komitmen dari pemerintah guna mengupayakan keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Mengenai anggaran terbatas yang dialokasikan untuk TNI, maka dilakukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa Indonesia sangat berperan aktif di kawasan Asia, seperti melakukan kerjasama dengan negara Asia lainnya dalam memerangi terorisme serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

Ir. Timotius D. Harsono, M. Si menyampaikan bahwa Lemhannas RI membangun sistem informasi data untuk *study assessment* yang bermanfaat untuk penilaian strategis atau pun untuk tujuan mendukung penyelenggaraan pendidikan di Lemhannas RI. Hal ini dilakukan melalui konsolidasi dengan seluruh provinsi di Indonesia. Data-data yang didapat dari provinsi akan diukur oleh Lemhannas RI. Selanjutnya hasil *assessment* dapat digunakan oleh provinsi bersangkutan, selain juga akan disampaikan kepada Presiden RI sebagai bahan masukan atau pun rekomendasi.

Indonesia saat ini selain menghadapi ancaman terorisme yang berasal dari dalam, juga harus mewaspadaikan ancaman-ancaman lainnya seperti pemanasan global, kelangkaan makanan dan lain-lain.

Pada akhir diskusi, tamu Pakistan menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Pakistan, terutama dari segi agama dan juga sosial budaya. Untuk itu, Pakistan mengharapkan dapat menggali kerjasama lebih jauh dengan Indonesia dalam berbagai hal termasuk persenjataan. Pakistan saat ini sudah membuat jet tempur sendiri, menjual suku cadang ke angkatan udara AS, serta ke negara-negara Timur Tengah.



Suasana diskusi antara Lemhannas RI dengan delegasi Pakistan *Air War College* di Gedung Atsa Gatra Lt. III Barat.

# Pelatihan Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik

Saat ini Lemhannas RI tengah melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga. Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memberikan sambutan pada pelatihan Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan dan Simulasi Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, 31 Mei 2010 di Gd. Dwi Warna Purwa yang diikuti oleh anggota Lemhannas RI dan perwakilan dari seluruh Provinsi.

Pada tahap pertama dari reformasi birokrasi yang sedang dilakukan, Lemhannas RI telah melakukan revitalisasi kelembagaan dengan berbasis teknologi. Terdapat 7 (tujuh) bidang utama yang direvitalisasi, yaitu *e-Office*, *e-Learning*, *e-Evaluation*, *e-Library*, *e-Procurement*, *e-Capacity Building* dan *e-Labkurtannas*.

Labkurtannas merupakan pengembangan dari sistem pengukuran ketahanan nasional yang selama ini telah dilakukan oleh Lemhannas. Semula sistem ini hanya digunakan sebagai latihan atau *academic exercise* bagi peserta PPSA dan PPRA, untuk ketahanan nasional di daerah pada saat peserta melakukan SSDN dan untuk mengukur ketahanan nasional suatu negara pada saat peserta PPSA dan PPRA melakukan SSLN.

Tahap selanjutnya Lemhannas RI melakukan peningkatan manfaat dari sistem tersebut, bukan hanya sebagai *academic exercise*, tetapi justru dapat digunakan untuk peringatan awal (*early warning system*) bagi pimpinan tingkat nasional (presiden), maupun pimpinan daerah. Pada tahun 2007, Lemhannas RI membangun laboratorium ini untuk mengembangkan suatu sistem yang dapat selalu memantau dan menganalisis ketahanan nasional baik di pusat maupun di daerah.

Pembangunan laboratorium ketahanan nasional sampai saat ini masih perlu ditingkatkan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah dan kompleks,



Suasana acara pembukaan Pelatihan Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI memberikan sambutan pada acara pembukaan Pelatihan Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik

ternyata sangat mempengaruhi ketahanan nasional baik secara *agregat*, *gatra*, maupun *spasial*. Sebagai contoh krisis keuangan global yang terjadi akhir-akhir ini tidak hanya berpengaruh pada ketahanan ekonomi tetapi ketahanan pada *gatra* sosial budaya, politik, bahkan keamanan. Demikian juga meluasnya HIV, H1N1, maupun penyakit menular lainnya, tidak hanya memberikan dampak pada penurunan ketahanan di bidang kesehatan (*gatra* sosial budaya) tetapi juga akan memberikan gangguan yang cukup berarti pada *gatra* ekonomi dan politik.

Lemhannas RI, sesuai dengan tugas pokok fungsinya, berkewajiban untuk membangun sistem tersebut, dan diharapkan dapat digunakan sebagai *early warning system* ketahanan nasional baik di pusat maupun di daerah serta sebagai sumber informasi dalam perencanaan daerah atau nasional, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan.

Untuk meningkatkan pengembangan sistem Labkurtannas ini, Lemhannas telah melibatkan pakar-pakar dari luar, seperti dari Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, LIPI, Trisakti, Bappenas, BPS, Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Kesehatan, dan lain-lain. Lemhannas RI juga menanda-tangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan seluruh provinsi di Indonesia untuk pengembangan laboratorium tersebut. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, telah diselenggarakan pelatihan tentang aplikasi pengukuran ketahanan nasional dan simulasi pengambilan keputusan kebijakan publik, dengan pelatihan ini diharapkan ada satu pemahaman bersama tentang sistem pengukuran ketahanan nasional dan pengambilan keputusan kebijakan publik.

# RAPAT DENGAR PENDAPAT DI KOMISI I DPR RI

**P**ada tanggal 3 Juni 2010, pukul 19.00 s/d 21.30 WIB, Lemhannas RI dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb yang di dampingi oleh Sekretaris Utama, DR. Ardi Partadinata, Para Deputi, dan beberapa pejabat lainnya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI.

Acara dibuka oleh pimpinan sidang yaitu Wakil Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin. Pada acara rapat dengar pendapat tersebut, Wakil Gubernur Lemhannas RI menyampaikan penjelasan Gubernur Lemhannas RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lemhannas RI TA 2011, dilanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab. Rapat Dengar pendapat di akhiri oleh pimpinan sidang pukul 21.30 WIB dengan catatan akan dilakukan RDP lagi untuk melakukan pembahasan yang lebih detail.



*Wakil Gubernur Lemhannas RI membacakan penjelasan Gubernur Lemhannas RI tentang RKAKL dan RKP Lemhannas RI TA. 2011*



*Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI tentang pembahasan RKAKL dan RKP Lemhannas RI TA. 2011*

**Pengarah :** DR. Ardi Partadinata, M.H., M.Si.

**Penanggung Jawab :** Brigjen TNI Kusworo, **Redaktur :** Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, M.H., M.Sc.

**Penyunting/Editor :** Kolonel Caj. M. Sochib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, M.M., Mayor Inf. Risnal S.H., M.A.

**Redaktur Pelaksana :** Linda Purnamasari, Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.

**Desain Grafis & Fotografer :** Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman Aryanto

**Sekretariat :** Syafrizal, Gatot

**Alamat Redaksi :** Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>